

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1989 China mengumumkan keadaan darurat militer dalam negeri. Keadaan yang dimana para awak militer mempunyai otoritas penuh untuk menegakkan sebuah hukum di lingkup kawasannya masing – masing. Keadaan darurat militer yang di deklarasikan China disebabkan oleh kejadian demonstrasi yang dianggap sebagai pemberontakan. Protes demonstrasi tersebut menuntut ideologi demokrasi agar ditegakkan di negara China. Tentu saja, demonstrasi ini tidak sepenuhnya menuntut mengenai penegakan demokrasi. Ada berbagai macam golongan yang memiliki *interest*-nya masing-masing.

Dari golongan mahasiswa dan kaum intelektual tentu sangat menuntut demokrasi terjadi seperti pemilihan umum pemimpin negara dari multi-partai dan nilai-nilai demokrasi lainnya. Para mahasiswa pada kala itu memiliki anggapan bahwa kebebasan pendapat dan pers sangat dibatasi. Sebagai warga negara China, mereka ingin ikut turut berperan dalam memajukan China. Khususnya untuk memberi saran terhadap pemerintah mengenai kebijakan yang diambil agar berpihak kepada masyarakat China.

Namun, beda kasusnya untuk para buruh. Golongan buruh maupun orang awam lebih peduli mengenai masalah ekonomi yang terjadi di China. Walaupun ketika ditanya mereka juga peduli mengenai demokrasi tetapi tingkat stress mereka lebih kepada ekonomi. Masyarakat awam menginginkan inflasi berakhir, yang mereka anggap sebagai beban karena harga barang melebihi daya beli yang mereka punya. Untuk tuntutan mengenai korupsi yang terjadi di China mendapat perhatian dari semua golongan. Dengan semua tuntutan dari setiap golongan disatukan maka akan

terbentuk 3 set permintaan yang kala itu ingin dicapai pada kejadian demonstrasi tersebut. 3 set permintaan tersebut adalah demokrasi, kemajuan ekonomi, dan musnahnya korupsi (Becard & Filho, 2019).

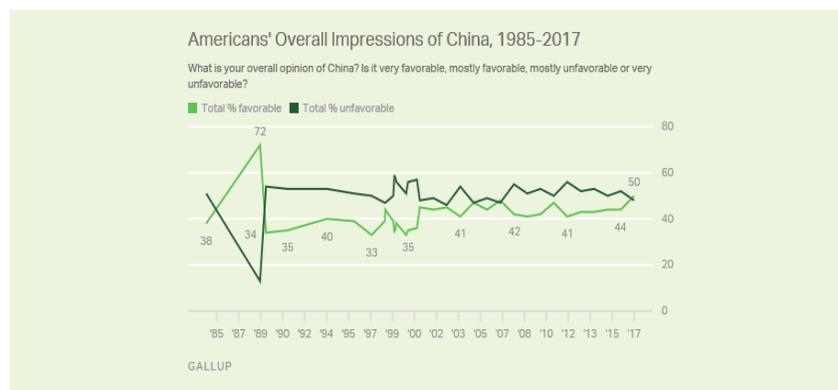
Protes demonstrasi yang berlangsung selama kurang lebih 6 minggu itu dikenal sebagai Gerakan demokrasi '89 dan terjadi tepatnya pada tanggal 15 April – 4 Juni 1989. Protes mengenai demokrasi yang terjadi di Tiananmen square ini berakhir dengan penerbitan darurat militer oleh pemerintah China. Tentara militer didampingi dengan tank dikirim ke Beijing untuk menghalau protes tersebut dan berakhir menelan korban jiwa.

Komunitas internasional, organisasi hak asasi manusia, dan para pengamat politik mengecam tindakan pemerintah China dalam penghalauan demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa tersebut. Pemerintah China menangkap siapapun yang mendukung protes tersebut, mengusir jurnalis asing, membatasi informasi peristiwa tersebut terhadap media domestik, memperkuat aparat keamanan negara, dan memutuskan hubungan kerja untuk pejabat yang memberi simpati terhadap peristiwa demonstrasi Tiananmen (Chung, 2019).

Pada tanggal 5 Juni, setelah kejadian Tiananmen Square Massacre tersebut, Presiden George H.W Bush mengadakan konferensi pers. Konferensi pers tersebut ditujukan untuk membahas isu mengenai pemerintah China yang secara brutal menghentikan demonstrasi tersebut dan menyatakan dukungan kepada para demonstran Tiananmen. Menurut Presiden George H.W Bush, Para demonstran di Beijing hanya menyatakan hal dasar mengenai hak asasi manusia. Mereka hanya menuntut mengenai kebebasan berpendapat, kebebasan press dan kebebasan berkumpul. Tujuan protes mengenai demokrasi tersebut sejalan dengan nilai demokrasi Amerika dan pandangan masyarakat Amerika Serikat mengenai hak dasar kebebasan (Jones, 2014).

Sejak saat itu pandangan maupun persepsi masyarakat Amerika Serikat cenderung negatif. Hal ini berkaitan dengan praktek politik China yang mereka anggap otoriter, brutal dan anti demokrasi.

Persepsi masyarakat Amerika Serikat terhadap China sudah cenderung negatif mulai dari tahun 1989 sejak terjadinya protes demokrasi dan memuncak di tahun 2001. Bisa dilihat dari survey Gallup yang dibuat oleh Lydia Saad sebagai berikut:



Gb.1.1 Persepsi Masyarakat Amerika Serikat Terhadap China (1985-2017, unit:%)

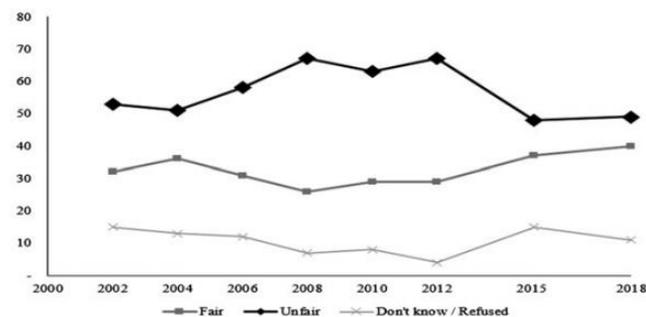
Sumber: https://news.gallup.com/poll/204227/china-image-positive-three-decades.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2001, 40% masyarakat Amerika Serikat memiliki pandangan positif mengenai China sementara 60% lainnya memiliki pandangan negatif tentang China (Saad, 2017).

Bahkan persepsi negatif mengenai China yang awal mula hanya mengenai ketidaksetujuan mengenai praktek politik di kawasan domestik China, berkembang berangsur-angsur secara terus

–menerus, menimbulkan konflik perang dagang karena kebijakan yang dibuat China mengenai tarif pajak barang dari Amerika Serikat (Laloggia, 2018).

Pada tahun 2016, ketika Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, dia memiliki persepsi yang buruk mengenai tarif dagang yang diberlakukan China untuk produk Amerika Serikat. Pandangan yang dimiliki Presiden Donald Trump terhadap China berimbas kepada terjadinya perang dagang pada tahun 2018 (Kalsie & Arora, 2019). Bisa dibuktikan dengan grafik dibawah ini :



Gb.1.2 Persepsi Masyarakat Amerika Serikat Terhadap praktek dagang China (2002-2015, unit:%)

Sumber: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/19/as-new-tariffs-take-hold-more-see-negative-than-positive-impact-for-the-u-s/>

Grafik survey yang dibuat oleh Pew tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2002-2015 hanya 30.5% masyarakat Amerika Serikat memiliki persepsi bahwa China melakukan perdagangan internasional dengan adil. Sementara itu 59.8% lainnya memandang bahwa China melakukan perdagangan internasional dengan tidak adil. Persepsi ini menjustifikasi tindakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Laloggia, 2018).

Bagaimanapun juga, persepsi negatif mengenai China harus diatasi dan dikonter. Menjaga pandangan positif sangatlah penting bagi China untuk meningkatkan Soft Power-nya. Saat kongres XVI Partai Komunis China digelar pada 15 Oktober 2007, Presiden Hu Jintao berpidato dengan menekankan bahwa sangat penting untuk meningkatkan soft power negara China untuk melengkapi hard power-nya (Becard & Filho, 2019). Hard power yang dimaksud oleh Hu Jintao adalah kekuatan ekonomi China yang saat ini terus menguat. Perekonomian China telah mencapai tahap yang luar biasa. Variabel paling krusial yang diperdebatkan pada abad 21 ini adalah kemunculan China sebagai pesaing negara adidaya. Bahkan, Kekuatan China sering disetarakan dengan Amerika Serikat dalam perdebatan dunia internasional belakangan ini. Ekonomi negara China terus merangkak naik dari tahun 2000-an (Paul, 2016).

Bisa kita lihat melalui *Gross Domestic Product*, China mendapatkan peringkat 7 dunia. Kehebatan China dalam mengelola ekonominya tidak berhenti disitu, pada tahun 2007 China sudah bisa menyalip *Gross Domestic Product* Jerman dan meraih peringkat ekonomi terkuat nomer 3 di dunia. Di tahun 2010, China menjadi ekonomi terkuat nomer 2 mengalahkan Jepang di lingkup *Gross Domestic Product*. Pada tahun 2014, Paritas Daya Beli China berhasil mengungguli Amerika Serikat. Meskipun GDP suatu negara bukanlah suatu hal yang sempurna untuk dijadikan tolak ukur, bisa diasumsikan bahwa ada kemungkinan ekonomi China akan melebihi Amerika Serikat suatu saat nanti. Akan tetapi, Di lingkup militer China masih jauh tertinggal dari Amerika Serikat. Setidaknya, butuh waktu 20 tahun agar Militer China setara dengan Amerika Serikat (Chung, 2019).

Perkembangan ekonomi China 30 tahun terakhir juga di dasari atas kebijakan yang diterapkan Deng Xiaoping. Kebijakan ini bernama *Open Door Policy* dimana China membuka diri seluas-luasnya kepada dunia internasional. *Open Door Policy* ini mereformasi perekonomian

China yang membuahkan hasil menumbuhkan laju perdagangan dan meningkatkan investasi dalam maupun luar negeri China (Bellabona & Spigarelli, 2007). Maka dari itu *soft power* yang dimiliki China harus mampu mengimbangi *hard power* yang merupakan kekuatan ekonominya.

Sedangkan untuk *soft power* yang dimaksud bisa mendampingi tersebut adalah bahasa. Bahasa menjadi sangat penting bagi China agar bisa mendampingi pertumbuhan ekonominya karena akan mempermudah China dalam melakukan perdagangan, meskipun akan sulit mengalahkan bahasa Inggris, setidaknya bahasa mandarin bisa menjadi salah satu *lingua franca* dalam perdagangan internasional. Sehingga menyebarkan bahasa menjadi menjadi tujuan utama yang ingin dicapai oleh China, dan pembangunan citra positif sebagai *soft power* pendamping (Effendi & Deniar, 2019).

Untuk memperbaiki pandangan negatif yang ada di masyarakat Amerika Serikat, sekaligus menyebarkan Bahasa mandarin di negara tersebut, China membangun sebuah institusi non-profit yang bernama Confucius Institute (Effendi & Deniar, 2019). Confucius Institute ini dibangun untuk melakukan pembangunan image positif China di Amerika Serikat sehingga tidak lagi dianggap sebagai negara anti-hak asasi manusia, anti-demokrasi dan kejam.

- **Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang menjadi acuan penulis untuk menulis skripsi ini. Penelitian tersebut berupa jurnal maupun skripsi dengan beberapa kemiripan. Akan tetapi, penulis memastikan bahwa belum ada penelitian yang sama dengan skripsi ini. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis untuk menulis skripsi ini adalah :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ardi Riyanto Rum, yang berupa skripsi dengan judul *KEBIJAKAN SOFT DIPLOMACY REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM PENINGKATAN HUBUNGAN BILATERAL DENGAN AMERIKA SERIKAT*. Dalam penelitian ini Ardi lebih menekankan kepada hubungan bilateral antara China dan Amerika Serikat. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS) merupakan dua negara yang menganggap pentingnya kerjasama bilateral. Namun yang menghalanginya adalah perbedaan nilai dan kebudayaan yang mereka panuti. Dalam meningkatkan hubungan bilateral, menurut Ardi, dilakukan melalui pendekatan kebudayaan dan penerapan nilai-nilai yang dianut oleh China (Riyanto, 2017).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Jeanet Priscila, yang berupa skripsi dengan judul *UPAYA-UPAYA DIPLOMASI PUBLIK TIONGKOK TERHADAP AMERIKA SERIKAT MELALUI CONFUCIUS INSTITUTE TAHUN 2014-2018*. Di dalam penelitian ini Jeanet lebih mengkaji tentang peran Confucius Institute dalam melakukan Diplomasi Publik di Amerika Serikat. Peran tersebut berupa pendekatan budaya dan berbagai macam event *people to people* lainnya (Priscila, 2019).

Dalam kedua penelitian tersebut, terdapat suatu celah dimana dampak dari diplomasi publik Confucius Institute terhadap persepsi masyarakat Amerika belum dikaji. Apakah yang dilakukan Confucius Institute efektif untuk mengurangi persepsi negatif yang beredar belum disajikan secara data oleh kedua penelitian tersebut. Maka dari itu, penulis akan mengisi celah tersebut mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan:

“Bagaimana peran Confucius Institute dalam mengubah persepsi negatif masyarakat Amerika terhadap China melalui diplomasi publik?”

C. Kerangka Teoritik

- **Teori Diplomasi Publik**

Diplomasi publik memiliki makna komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap masyarakat internasional yang bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman tentang negara, sikap, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang diambil oleh negara tersebut. Hans Tuch (2010) mengatakan Diplomasi publik juga bisa dilihat sebagai usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara negara dan masyarakat tertuju. Hasil yang didapatkan dari sebuah diplomasi publik berdampak pada bidang politik, ekonomi, social dan pelaksanaannya bukan hanya dari pemerintah.

Diplomasi publik juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mempengaruhi organisasi atau individu di luar negaranya dengan cara positif. Sehingga individu maupun organisasi tersebut mengubah cara pandangnya terhadap negaranya. Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik memiliki fungsi untuk meraih kepentingan nasional dengan cara melakukan pemahaman, memberi informasi, dan mempengaruhi publik di luar negaranya.

Diplomasi publik memiliki beberapa jalur yang bisa dilewati para aktornya:

1. Jalur pemerintah, melalui departemen luar negeri, pejabat dan anggota parlemen merupakan actor utama dalam diplomasi dan negosiasi.
2. Jalur Kelompok NGO/kalangan Profesional, Aksi Lembaga non pemerintah yang bertujuan untuk meraih kepentingan nasional dan mengorganisir maupun mengelola isu tertentu.
3. Jalur kelompok bisnis, melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Potensi pengaruh maupun kepentingan bisa didapatkan melalui penyediaan lapangan kerja dan kerjasama perdagangan yang bisa menimbulkan rasa saling pengertian antar negara.
4. Jalur Pendidikan, penelitian dan pelatihan. Jalur ini dilakukan melalui pelatihan dan pembelajaran. Pemerintah biasanya akan bekerja sama dengan universitas dengan menyediakan program-program pelatihan. Aktivitas yang ditawarkan bisa beragam seperti Bahasa, studi perdamaian, manajemen dan resolusi konflik dan sebagainya.

Christopher Ross (2003) menyebutkan ada beberapa pilar yang membentuk sebuah diplomasi publik. Diantaranya adalah:

1. Memastikan bahwa warga negara tujuan paham akan norma atau nilai-nilai yang berlaku di negara asal. Bukan berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat.
2. Mengadakan aktivitas yang ditujukan kepada masyarakat luas, bukan hanya Sebagian orang. Aktivitas tersebut bisa disebarakan melalui media cetak maupun documenter.
3. Bekerja sama dengan banyak instansi untuk menciptakan representative yang mana representative tersebut akan menyebarkan pemahaman yang diinginkan ke golongan mereka masing-masing.
4. Program pertukaran internasional yang aktif dan komunikatif.

Confucius Institute merupakan Lembaga non-profit yang dibuat oleh China untuk melaksanakan diplomasi publiknya melalui jalur pendidikan. Confucius Institute didirikan di universitas luar China dan memiliki tujuan untuk mempromosikan *image* positif dari negara China. Pelatihan yang diberikan oleh Confucius Institute biasanya berupa pelatihan Bahasa mandarin, menulis huruf traditional China dan pengenalan budaya China. Dengan adanya Confucius Institute diharapkan masyarakat Amerika Serikat dapat mengubah pandangannya terhadap China yang sebelumnya negatif menjadi positif.

Cara Confucius Institute menjalankan aktivitas budayanya sejalan dengan 4 pilar diplomasi publik yang diutarakan oleh Christopher Ross. Confucius Institute mengadakan berbagai acara workshop serta event budaya. Program tersebut digunakan untuk menarik minat masyarakat agar mengubah pandangannya mengenai China tentang praktek politiknya yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan anti demokrasi. Disamping itu, Confucius Institute juga sering mengadakan program trip to China sehingga masyarakat Amerika Serikat bisa belajar dan mengunjungi negara China secara langsung. Program trip to China ini diharapkan untuk bisa membuat masyarakat Amerika Serikat merasakan dan belajar langsung tanpa opini-opini publik negatif yang beredar di Amerika Serikat.

- **Teori Pendidikan Behaviorisme**

Penulis juga akan melihat studi kasus dengan kaca mata teori pendidikan. Teori pendidikan yang penulis pilih adalah behaviorisme dari Ross Vasta, Marshall M. Haith, dan Scott A. Miller yang dimuat dibukunya yang berjudul *Child Psychology : The Modern Science* (1991). Behaviorisme merupakan pendekatan yang ada dalam psikologi pendidikan. Pendekatan ini memiliki pemahaman bahwa seseorang dapat dibentuk sesuai keinginan dari orang yang membentuknya. Perkembangan perilaku individu secara psikologis sangat ditentukan oleh faktor yang berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dalam konsep pendidikan behaviorisme metode yang digunakan adalah metode *conditioning*.

Metode *conditioning* merupakan metode yang menekankan antara hubungan stimulus dan respon yang bisa diukur dan diamati. Memandang sebuah individu sebagai makhluk yang reaktif terhadap pembelajaran yang didapatkan. Pengalaman dan pendampingan akan mengubah dan membentuk perilaku individu tersebut. Menurut teori behaviorisme, pesan pembelajaran berhasil disampaikan apabila ada perubahan tingkah laku ataupun psikologi. Seseorang telah belajar sesuatu apabila menunjukkan adanya perubahan tingkah laku (Vasta, Haith, & Miller, 1991).

Menurut teori behaviorisme faktor terpenting adalah input (stimulus) dan output (respon). Dalam kasus yang penulis teliti, terdapat stimulus dan respon yang bisa diamati dan diukur. Confucius Institute hadir sebagai pemberi stimulus dalam aktivitas pendidikan bahasa dan pengenalan budaya yang dijalankan. Stimulus ini berupa pembelajaran dan sosialisasi langsung dengan masyarakat China melalui program – program yang telah dibentuk seperti *people to people program* dan *Chinese cultural festival*. Stimulus yang diberikan memiliki tujuan untuk membantu para pelajar dan masyarakat Amerika Serikat secara perlahan untuk dapat memahami mengenai China dan budayanya.

Respon adalah reaksi terhadap stimulus yang diberikan oleh Confucius Institute. Sebuah respon bisa dipengaruhi oleh faktor penguat (*reinforcement factor*). Faktor penguat tersebut adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon dari objek pendidikan dalam hal ini adalah masyarakat Amerika Serikat dan para pelajar muda Confucius Institute.

Respon yang ingin dicapai China melalui Confucius Institute adalah berkurangnya stigma negatif yang telah beredar di Amerika Serikat. Pencapaian respon tersebut dibantu oleh faktor penguat (*reinforcement factor*) yaitu media lokal Amerika Serikat yang memberitakan mengenai event publik Confucius Institute secara positif. Sehingga Respon tersebut menghasilkan perubahan perilaku dan psikologis masyarakat Amerika Serikat yang semula memiliki persepsi negatif menjadi positif.

- **Konsep Transnasionalisme**

Dalam buku yang ditulis oleh Rainer Bauböck dan Thomas Faist yang berjudul *Diaspora and Transnationalism Concepts, Theories and Methods* tahun 2010 menjelaskan bahwa, aktivitas hubungan internasional antar negara di era globalisasi, meyuguhkan berbagai dinamika baru. Dinamika tersebut salah satunya adalah menipisnya batas-batas kedaulatan negara.

Menipisnya suatu batas negara bukan dalam artian negara kehilangan kedaulatan negara, akan tetapi, ada aktor / agen yang bisa masuk ke dalam sebuah negara tersebut dan menjalankan berbagai macam aktivitasnya dikarenakan efek dari globalisasi. Dalam melakukan aktivitas transnasionalisme aktor/agen akan menggunakan pendekatan yang bernama *cross-border* (lintas batas negara) dengan memanfaatkan formasi sosial yang sudah terbentuk. Formasi sosial tersebut bisa berupa kebudayaan, agama, politik, ekonomi, maupun pendidikan.

Dalam buku yang ditulis oleh Rainer dan Thomas (2010), menjelaskan bahwa konsep transnasionalisme awal lebih mengesampingkan atau sama sekali tidak menganggap peran suatu negara itu ada dalam gerakannya. Akan tetapi, baru-baru ini banyak sekali pengamat yang menganggap bahwa peran suatu negara sangat krusial dalam gerakan transnasional. Pada gerakan transnasional di tahun-tahun sekarang, negara juga ikut mengalir dan terlibat dalam kegiatan yang melibatkan formasi sosial dalam gerakan transnasional. Negara menjadi pembantu suksesnya gerakan transnasional, dengan membantu secara *partnership* maupun finansial.

Organisasi internasional, organisasi pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah mempunyai pengaruh secara signifikan di berbagai ranah formasi sosial. Penetrasi juga jauh lebih mudah karena suatu kerjasama maupun *partnership* yang dilakukan oleh 2 negara terkait. Sistem yang tercipta akibat globalisasi, membuka peluang lebar bagi aktor/agen yang menjalankan transnasionalisme untuk berkolaborasi atau mempengaruhi suatu fenomena maupun persoalan yang ada (Bauböck & Faist, 2010).

Jadi bisa disimpulkan bahwa, transnasionalisme adalah suatu teori, yang membicarakan mengenai konsep *cross-border* yang dilakukan oleh suatu aktor/agen baik itu organisasi internasional, organisasi pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah dalam melakukan hubungan di berbagai formasi sosial yang ada. Adanya campur tangan dari negara sering kali menjadi salah satu faktor krusial untuk menentukan keberhasilannya.

Aktor/agen dalam transnasionalisme bisa bergerak di berbagai bidang formasi sosial yang sedang dibutuhkan seperti kebudayaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan lain-lain. Oleh karena itu, penetrasi ke suatu negara lebih mudah karena negara tersebut membutuhkan sesuatu timbal balik dari aktor/agen gerakan transnasional tersebut. Gerakan transnasional menjadi salah

satu cara suatu aktor dalam upayanya mengatasi isu. Ruang gerak aktor juga lebih luas karena tidak adanya batasan teritori tertentu.

Dalam konsep transnasionalisme organisasi internasional, organisasi pemerintah maupun non pemerintah merupakan sebuah aktor vokal yang akan memperjuangkan suatu isu yang menjadi perhatian negara asalnya. Memberikan pengaruh melalui media digital, media cetak, berita, penelitian, kampanye dan berbagai macam cara. Mereka mengusung suatu isu yang mereka perjuangkan (Suparman, 2017).

Confucius Institute, sebagai aktor/agen milik China bergerak di bidang pendidikan dan budaya. Penetrasi Confucius Institute di Amerika Serikat dimudahkan karena pada tahun 2006, Amerika Serikat menganggap bahasa Mandarin sebagai kepentingan. Hasilnya adalah NSLI (*National Security Language Initiative Amerika Serikat*), kerjasama antara Confucius Institute dan Amerika Serikat di bidang pelatihan bahasa (NSLI-Y, 2020).

Selain dibentuk untuk memberikan pelatihan bahasa mandarin, Confucius Institute juga memiliki misi lain. Misi tersebut adalah menghilangkan isu stigma negatif yang beredar di masyarakat. Dengan cara mengadakan event kebudayaan masyarakat ke masyarakat. Membuat media berita lokal Amerika Serikat memberitakan mengenai hal positif dari Confucius Institute.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah beserta kerangka teoritik/kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas. Maka, hipotesa yang bisa disimpulkan oleh penulis adalah:

Confucius Institute turut berkontribusi dalam mengubah image negatif China di Amerika Serikat melalui program pengenalan budaya dan pelatihan bahasanya yang bersifat transnasional.

E. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran aktor diplomasi publik China yakni Confucius Institute dalam implementasi kebijakan diplomasi publik pemerintah China di Amerika Serikat dalam mengubah pandangan negatif masyarakat amerika Serikat yang selama ini beredar.

Selain itu, tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai sarana penulis untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan dibangku perkuliahan secara teoritik untuk dapat digunakan secara aplikatif, serta sebagai syarat utama untuk penulis menyelesaikan program studi sarjana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama dalam melakukan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian digunakan untuk memberi paparan menyeluruh mengenai peran Confucius Institute dengan kaitannya terhadap diplomasi publik pemerintah China di Amerika Serikat. Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang

dilakukan secara terbatas untuk mengungkap suatu masalah maupun fenomena yang terjadi di negara yang menjadi obyek penelitian dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dari sumber buku, jurnal, dan berita dari media cetak maupun digital yang relevan dengan kasus yang sedang dikaji. Selain menggunakan sumber tersebut, penulis juga menggunakan sumber yang bersifat documenter dengan tujuan menunjang kegiatan penelitian.

G. Jangkauan Penelitian

Sebagai upaya agar penelitian dan penulisan skripsi tidak meluas dan menjadikan pemaknaan akhir menjadi rancu serta tidak jelas, penulis membatasi jangkauan penelitian dengan topik Dampak Diplomasi Publik China Melalui Confucius Institute Terhadap Persepsi Masyarakat Amerika Serikat dari tahun 2005-2017. Penulis akan menyinggung data-data dan fakta diluar jangkauan penelitian jika diperlukan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab 2 PERKEMBANGAN DIPLOMASI PUBLIK CHINA

Bab ini akan membahas secara lengkap perkembangan diplomasi publik China mulai dari periode 1949 hingga Confucius Institute dibentuk. Perjalanan menarik yang begitu kompleks dimulai dari kegagalan ekonomi dan kesadaran pemimpin akan pentingnya soft power.

Bab 3 STRATEGI CONFUCIUS INSTITUTE DALAM MENJALANKAN DIPLOMASI PUBLIK DI AMERIKA SERIKAT

Bab ini akan berisi bahasan mengenai strategi Confucius Institute dalam melakukan diplomasi publik di Amerika Serikat. Dengan menjalankan event yang secara langsung menetapkan sasaran terhadap publik.

Bab 4 DAMPAK DIPLOMASI PUBLIK CONFUCIUS INSTITUTE TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT DI AMERIKA SERIKAT

Bab ini membahas mengenai hasil dari diplomasi publik Confucius Institute yang mengedepankan event. Di bab ini juga menjelaskan topik-topik yang cenderung dipilih media lokal untuk meliput Confucius Institute. Hingga akhirnya berdampak pada citra dan persepsi masyarakat Amerika Serikat terhadap China.

Bab 5 KESIMPULAN